



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis**

*Terakreditasi UNGGUL*  
SK BAN-PT No. 1842/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**Analisis Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2014-2023**

Skripsi  
Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana  
Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis

Oleh  
Zefinzky Hizkia Mulyawan

6082001030

Bandung  
2024



**Universitas Katolik Parahyangan**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis**

*Terakreditasi UNGGUL*  
SK BAN-PT No. 1842/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**Analisis Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2014-2023**  
**Skripsi**

Oleh  
Zefinzky Hizkia Mulyawan  
6082001030

Pembimbing  
Shelvi, S. AB., M.M.

Bandung  
2024

Universitas Katolik Parahyangan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Program Studi Administrasi Bisnis Program Sarjana



**Tanda Persetujuan Skripsi**

Nama : Zefinzky Hizkia Mulyawan  
Nomor Pokok : 6082001030  
Judul : Analisis Pajak Daerah Kota Bandung tahun 2014-2023

Menyetujui untuk diajukan pada  
Ujian Sidang jenjang Sarjana

Bandung,

Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Shelvi".

Shelvi, S. AB., M.M.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Administrasi Bisnis

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Tirta".

Adrianus Tirta, S.E., M.M.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan Administrasi Bisnis  
Program Studi Administrasi Bisnis Program Sarjana



**Tanda Pengesahan Skripsi**

Nama : Zefinzky Hizkia Mulyawan  
Nomor Pokok : 6082001030  
Judul : Analisis Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2014-2023  
Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana  
Pada Rabu, 3 Juli 2024  
Dan dinyatakan **LULUS**

**Tim Pengaji**

**Ketua sidang merangkap anggota**

Dr. Maria Widyarini, S.E., M.T. :                  | 4. |                 

**Sekretaris**

Shelvi, S.AB., M.M. :                  |                  |                 

**Anggota**

Dr. Daniel Karim, S.I.P., MM. :                  |                  |                 

Mengesahkan,

Pj. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Orpha Jane".

Dr. Orpha Jane

## **LEMBAR PERNYATAAN PLAGIARISM**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Zefinzky Hizkia Mulyawan

NPM : 6082001030

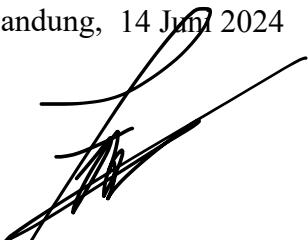
Jurusan/Program Studi : Administrasi Bisnis

Judul : Analisis Pajak Daerah Kota Bandung tahun 2014-2023

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sebagai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 14 Jun 2024



Zefinzky Hizkia Mulyawan

## **ABSTRAK**

Nama : Zefinzky Hizkia Mulyawan  
NPM : 6082001030  
Judul : Analisis Pajak Daerah Kota Bandung Tahun 2014-2023

---

Kota Bandung merupakan ibu kota Jawa Barat yang menarik banyak pengunjung untuk datang ke kota ini. Kota Bandung memiliki PAD dari berbagai sumber. Salah satu sumber utama PAD Kota Bandung adalah pajak daerah. Selain upaya pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak daerah warga Kota Bandung juga turut berpartisipasi dalam membangun daerahnya. Terbukti dengan Kota Bandung dinobatkan sebagai daerah dengan penerimaan pajak paling taat se-Jawa Barat pada tahun 2021.

Penelitian yang dilakukan dengan jenis kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini menggunakan data primer dan sekunder. Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana pendapatan dari sektor pajak daerah yang ada di Kota Bandung, sistem apa yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk menstabilkan pendapatan pajak daerah Kota Bandung, dan potensi menarik bagi daerah lain untuk belajar dan menerapkan sistem sukses yang dipelopori oleh pemerintah Kota Bandung.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung dari sektor pajak daerah memiliki tingkat ketstabilan realisasi yang relatif tinggi. Tingkat persentase realisasi Kota Bandung mempunyai hasil yang baik, tetapi kontribusi dari setiap jenis mata pajak di Kota Bandung hanya ada 2 jenis mata pajak yang memiliki kontribusi cukup yaitu BPHTB dan PBB.

Meskipun penerimaan dari sektor pajak daerah Kota Bandung sudah memiliki tingkat persentase realisasi yang baik pemerintah Kota Bandung tidak berhenti untuk terus berupaya memaksimalkan potensi dari setiap jenis mata pajak.

Kata kunci : Pajak, pajak daerah, Kota Bandung

## ***ABSTRACT***

*Name : Zefinzky Hizkia Mulyawan  
Student ID : 6082001030  
Title : Analysis of Local Taxes in Bandung City From 2014 - 2023*

---

*The city of Bandung is the capital of West Java which attracts many visitors to come to this city. The city of Bandung has PAD from various sources. One of the main sources of Bandung City PAD is local taxes. Apart from the government's efforts to maximize revenue from the regional tax sector, Bandung City residents also participate in developing their region. This is proven by the city of Bandung being named the region with the most compliant tax revenue in West Java in 2021.*

*This research was conducted qualitatively with a case study approach using primary and secondary data. This research will discuss how revenue from the regional tax sector is in Bandung City, revenue from the regional tax sector is in Bandung City, what systems the regional government implements to stabilize Bandung City regional tax revenues, and the exciting potential for other regions to learn from and implement the successful system pioneered by the Bandung City government.*

*The research results obtained are that Bandung City's revenues from the regional tax sector has a relatively high level of stability in realization. The percentage level of realization for the City of Bandung has good results. However, the contribution of each tax item in the City of Bandung is that only two types of tax items have sufficient contributions, namely BPHTB and PBB. Even though revenues from the Bandung City regional tax sector already have a good percentage level of realization, the Bandung City government continues to try to maximize the potential of each type of tax item.*

*Keywords: Tax, regional tax, Bandung City*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan kasih-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal penelitian dengan judul “Analisis Pajak Daerah Kota Bandung tahun 2014-2023” dengan tepat waktu. Proposal penelitian ini disusun untuk memenuhi persyaratan tugas akhir Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan berbagai dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Orang tua dan keluarga yang selalu memberikan doa dan dukungan selama proses penyusunan laporan penelitian ini.
2. Shelvi, S.AB., M.M selaku dosen pembimbing yang telah membantu dan membimbing penulis selama proses pembuatan penelitian. Penulis mengucapkan terimakasih untuk waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama proses penggerjaan skripsi dari awal hingga selesai.
3. Seluruh dosen dan staf Program Studi Administrasi Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu.
4. Teman-teman penulis Shania, Romeld, Rajjabi, Salman, Glenn, Hizkia, Benjamin, Fernando, Rowen, Hafiz, dan Raihan yang selalu memberikan dukungan dan masukan selama proses penyusunan laporan penelitian ini.
5. Semua pihak lain yang telah ikut berkontribusi dalam penyusunan laporan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa proposal penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap adanya kritik dan saran yang dapat memperbaiki dan mengembangkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih atas perhatian pembaca dan berharap agar proposal penelitian ini dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi pembaca.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Pertanyaan Penelitian.....	4
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Kegunaan Penelitian .....	4
1.5 Objek penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA &amp; METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>6</b>
2.1 Undang-Undang HKPD .....	6
2.2 Pajak.....	6
2.3 Pajak Daerah .....	7
2.4 Peraturan Daerah Kota Bandung.....	8
2.4.1 Pajak Hotel .....	9
2.4.2 Pajak Hiburan .....	11
2.4.3 Pajak Reklame.....	13
2.4.4 Pajak Penerangan Jalan.....	15
2.4.5 Pajak Restoran.....	17
2.4.6 Pajak Parkir.....	18
2.4.7 Pajak Air Tanah.....	19
2.4.8 Pajak Bumi dan Bangunan .....	21
2.4.9 Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).....	24
2.5 Penelitian Terdahulu .....	29
2.6 Metodologi Penelitian .....	33
2.6.1 Jenis Penelitian .....	34
2.6.2 Sumber Data .....	34
2.6.3 Jenis Data.....	34
2.6.4 Teknik Analisis Data.....	35

2.7 Tahapan Penelitian.....	37
<b>BAB III HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
3.1 Pajak Daerah Kota Bandung .....	38
3.1.1 Pajak Hotel Kota Bandung .....	39
3.1.2 Pajak Restoran Kota Bandung .....	42
3.1.3 Pajak Hiburan Kota Bandung.....	45
3.1.4 Pajak Parkir Kota Bandung.....	48
3.1.5 Pajak Penerangan Jalan Kota Bandung .....	51
3.1.6 BPHTB Kota Bandung.....	54
3.1.7 PBB Kota Bandung .....	57
3.1.8 Pajak Air Tanah Kota Bandung.....	60
3.1.9 Pajak Reklame Kota Bandung .....	63
3.2 Analisis Hasil Penelitian .....	66
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>73</b>
4.1 Kesimpulan .....	73
4.2 Rekomendasi .....	74
4.3 Implikasi.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN HASIL WAWANCARA .....</b>	<b>78</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2. 1</b> Hasil Penelitian Terdahulu .....	29
<b>Tabel 2. 2</b> Kriteria Nilai Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD .....	36
<b>Tabel 3. 1</b> Hasil Perhitungan Pajak Hotel Kota Bandung tahun 2014-2023 .....	40
<b>Tabel 3. 2</b> Hasil Perhitungan Pajak Restoran Kota Bandung tahun 2014-2023 ...	43
<b>Tabel 3. 3</b> Hasil Perhitungan Pajak Hiburan Kota Bandung tahun 2014-2023 ....	46
<b>Tabel 3. 4</b> Hasil Perhitungan Pajak Parkir Kota Bandung tahun 2014-2023 .....	49
<b>Tabel 3. 5</b> Hasil Perhitungan Pajak Penerangan Jalan Kota Bandung tahun 2014-2023 .....	52
<b>Tabel 3. 6</b> Hasil Perhitungan BPHTB Kota Bandung tahun 2014-2023 .....	55
<b>Tabel 3. 7</b> Hasil Perhitungan PBB Kota Bandung tahun 2014-2023 .....	58
<b>Tabel 3. 8</b> Hasil Perhitungan Pajak Air Tanah Kota Bandung tahun 2014-2023.	61
<b>Tabel 3. 9</b> Hasil Perhitungan Pajak Reklame tahun 2014-2023 .....	64
<b>Tabel 3. 10</b> Persentase Realisasi & Kontribusi Pajak Daerah Kota Bandung.....	68

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 1. 1</b> Grafik Pertumbuhan per tahun PAD Kota Bandung .....	2
<b>Gambar 2. 1</b> Tahapan Penelitian.....	37
<b>Gambar 3. 1</b> Grafik Pertumbuhan per tahun Pajak Daerah Kota Bandung .....	39
<b>Gambar 3. 2</b> Grafik Realisasi Pajak Hotel Kota Bandung .....	41
<b>Gambar 3. 3</b> Grafik Kontribusi Pajak Hotel Kota Bandung terhadap PAD .....	42
<b>Gambar 3. 4</b> Grafik Realisasi Pajak Restoran Kota Bandung .....	44
<b>Gambar 3. 5</b> Grafik Kontribusi Pajak Restoran Kota Bandung .....	45
<b>Gambar 3. 6</b> Grafik Realisasi Pajak Hiburan Kota Bandung .....	47
<b>Gambar 3. 7</b> Grafik Kontribusi Pajak Hiburan Kota Bandung.....	48
<b>Gambar 3. 8</b> Grafik Realisasi Pajak Parkir Kota Bandung.....	50
<b>Gambar 3. 9</b> Grafik Kontribusi Pajak Parkir Kota Bandung.....	51
<b>Gambar 3. 10</b> Grafik Realisasi Pajak Penerangan Jalan Kota Bandung .....	53
<b>Gambar 3. 11</b> Grafik Kontribusi Pajak Penerangan Jalan Kota Bandung.....	54
<b>Gambar 3. 12</b> Grafik Realisasi BPHTB Kota Bandung .....	56
<b>Gambar 3. 13</b> Grafik Kontribusi BPHTB Kota Bandung.....	57
<b>Gambar 3. 14</b> Grafik Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandung .....	59
<b>Gambar 3. 15</b> Grafik Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Kota Bandung.....	60
<b>Gambar 3. 16</b> Grafik Realisasi Pajak Air Tanah Kota Bandung.....	62
<b>Gambar 3. 17</b> Grafik Kontribusi Pajak Air Tanah Kota Bandung .....	63
<b>Gambar 3. 18</b> Grafik Realisasi Pajak Reklame Kota Bandung .....	65
<b>Gambar 3. 19</b> Grafik Kontribusi Pajak Reklame Kota Bandung .....	66

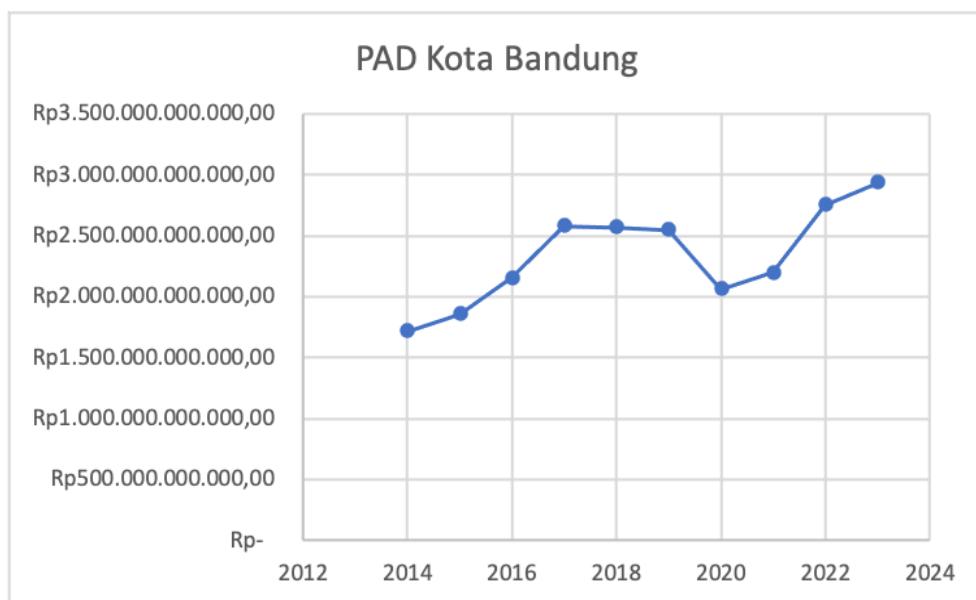
# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemerintah Indonesia terus berupaya agar perbaikan layanan publik, pemerataan pembangunan, dan percepatan transformasi ekonomi di Indonesia dapat merata dan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia dapat tercapai. Upaya yang dilakukan pemerintah salah satunya adalah dengan pengesahan reformasi desentralisasi fiskal yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah (UU HKPD). UU HKPD ini diharapkan dapat memperkuat desentralisasi fiskal seperti perubahan kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) diarahkan untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah dan menjaga akses masyarakat dengan tidak menambah beban Wajib Pajak. Kemudian pemerintah mengharapkan adanya peningkatan kualitas belanja daerah dengan diberlakukannya simplifikasi dan sinkronisasi program prioritas daerah. Selain itu, sinergi fiskal dalam hal penyelarasan antara penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah, juga dilakukan demi mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Kemenkeu. 2023. “Wujudkan Kesejahteraan Adil dan Merata, Ini Dia Peran Penting UU HKPD”.).

PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Oleh karena itu, objek pajak di setiap daerah berbeda, begitu juga dengan sistem atau inovasi yang dilakukan pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan pajak daerah. Dari berbagai daerah di Indonesia, Kota Bandung menjadi daerah yang Penerimaan asli daerahnya selalu konsisten. Grafik pertumbuhan per tahun PAD Kota Bandung dapat dilihat pada Gambar 1.1.



**Gambar 1. 1** Grafik Pertumbuhan per tahun PAD Kota Bandung

Sumber : Pengolahan data oleh penulis

Kota Bandung merupakan ibu kota Jawa Barat yang tentunya menarik perhatian wisatawan untuk berkunjung ke Kota Bandung. Dengan daya tarik yang dimiliki oleh Kota Bandung seperti kuliner dan tempat-tempat wisata tentunya akan mempengaruhi penerimaan dari sektor pajak daerahnya. Oleh karena itu pemanfaatan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Bandung harus digunakan dengan maksimal agar Kota Bandung dapat terus berkembang. Terdapat beragam jenis penerimaan atau pendapatan dari pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kota Bandung, berikut adalah jenis mata pajak yang dipungut pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, BPHTB, PBB, pajak air tanah, dan pajak reklame.

Kota Bandung sendiri memiliki target yang cukup tinggi untuk penerimaan-penerimaan pajak daerahnya. Penerimaan pajak hotel di kota bandung ditargetkan sebesar Rp 124.000.000.000 pada tahun 2021 dan mampu merealisasikan sebesar Rp 163.856.465.266 atau 132.1% dari target yang telah ditetapkan. Target yang telah ditetapkan untuk setiap sumber penerimaan dari sektor pajak daerah akan ditingkatkan setiap tahunnya agar pembangunan dan pengelolaan Kota Bandung

terus meningkat dan dapat terus berkembang tanpa bergantung kepada sumber dana dari pusat. Oleh karena itu, pemerintah Kota Bandung harus mampu mempertahankan penerimaan yang diperoleh dari pajak daerah yang memiliki jumlah penerimaan besar, agar pemerintah Kota Bandung mampu melakukan pembangunan dan pengelolaan daerah dengan baik. Sehingga, masyarakat Kota Bandung dapat menikmati fasilitas-fasilitas yang dibangun pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Kota Bandung.

Jenis mata pajak yang memiliki potensi memberikan penerimaan daerah yang besar adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Penerimaan pajak daerah Kota Bandung dari sektor pajak sendiri sudah termasuk baik dengan konsistensi yang baik setiap tahunnya. Meskipun ada beberapa mata pajak yang tidak selalu konsisten tapi tetap berada di angka yang wajar dan untuk mata pajak yang telah konsisten rata-rata penerimaan kota bandung untuk mata pajak yang telah konsisten selalu mendapatkan penerimaan diatas 80% sampai dengan 100% atau lebih setiap tahunnya. Konsistensi penerimaan Kota Bandung dari sektor pajak juga disebabkan oleh warga Kota Bandung yang taat dalam membayar pajak (Redaksi DDTC news. 2022. “Warga Kota Bandung Diklaim Paling Taat Bayar Pajak se-Jawa Barat”. dilansir dari berita tersebut warga Kota Bandung memiliki ketiaatan membayar pajak dengan angka 90% se-Jawa Barat pada tahun 2021 dan hanya 10% warga Kota Bandung yang menunggak untuk membayar pajak daerah Kota Bandung. Oleh karena itu, peneliti hendak melakukan penelitian dengan judul analisis pajak daerah Kota Bandung tahun 2014-2023. Penulis memilih untuk melakukan analisis dalam kurun waktu 10 tahun karena penting untuk melihat kinerja pemerintah Kota Bandung dalam melakukan pemungutan pajak daerah dan melihat bagaimana perkembangan pajak daerah Kota Bandung dalam 10 tahun terakhir. Dengan adanya analisis yang dilakukan diharapkan agar pemerintah Kota Bandung dapat terus meningkatkan atau mempertahankan stabilitas PAD dari sektor pajak daerah.

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

1. Berapa kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PAD Kota Bandung?
2. Apa yang dilakukan pemerintah Kota Bandung sehingga penerimaan pajak Kota Bandung selalu mencapai target dan menjadi daerah yang memiliki penduduk dengan ketiaatan membayar pajak nomor satu se-Jawa Barat?
3. Apakah inovasi dan strategi yang diterapkan oleh kota Bandung sudah bisa diterapkan dan dapat menjadi contoh untuk daerah lain?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Bandung dan cara pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Kota Bandung.
2. Menganalisis cara pemerintah Kota Bandung agar penduduknya dapat membayar pajak dengan taat.
3. Menganalisis sistem yang digunakan oleh Kota Bandung agar dapat digunakan oleh daerah lain.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1. Peneliti**

Manfaat Penelitian untuk peneliti sendiri adalah untuk memenuhi syarat kelulusan dan menyelesaikan tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana. Selain itu peneliti mengerti tentang pajak daerah di Kota Bandung.

### **2. Pemerintah**

Penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk pemerintah agar dapat mengikuti sistem pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh objek penelitian. Selain itu pemerintah dapat mengetahui potensi pendapatan pajak daerah baik di Kota Bandung maupun Daerah lain.

### **3. Pembaca**

Manfaat penelitian ini bagi pembaca adalah agar pembaca dapat mengetahui informasi tentang performa dan cara pemerintahan Kota Bandung dalam melakukan pemungutan pajak daerah.

### **1.5 Objek penelitian**

Kota Bandung, kota terbesar di provinsi Jawa Barat dan menjadi kota terbesar ketiga di Indonesia dengan luas 16.729,65 Ha. Kota Bandung atau yang sering disebut sebagai Kota kembang ini memiliki jumlah penduduk 2.444.160 jiwa (sensus penduduk 2020) dengan laju pertumbuhan penduduk 0,21% dan memiliki kepadatan penduduk sebesar 14 608,57 jiwa per kilometer persegi. Potensi investasi di Kota Bandung berada di sektor pariwisata khususnya wisata kuliner yang menjadi salah satu daya tarik dari kota ini.